

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat teratasi di Indonesia. Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan miskin yaitu suatu keadaan sosial yang serba kekuarangan yang dialami oleh seseorang atau keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya. Islam secara rinci membahas terkait dengan kemiskinan bahkan Islam mengatur hak dan kewajiban antara kelompok kaya dan kelompok miskin dengan tujuan agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi antar individu atau kelompok.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari lima tahun sebelumnya Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami kenaikan. Tercatat Bulan September

¹Naylal Fithri & David Kaluge, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 2 (2017) Universitas Brawijaya, h.130.

2016 sekitar 27.764.320 jiwa dengan persentase (10,79%), ini merupakan jumlah yang sangat tinggi dimana dari jumlah 27.764.320 jiwa ini angka kemiskinan didominasi oleh penduduk desa dengan jumlah penduduk 17.278.680 jiwa, sedangkan penduduk perkotaan mencapai angka 10.485.640 jiwa yang termasuk kategori penduduk miskin. Selanjutnya dari Tahun 2017 sampai 2019 angka kemiskinan dapat ditekan hingga sampai pada (9,22%) dari sebelumnya (10,70%). Namun, pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali melonjak dari sebelumnya 24.785.870 jiwa (2019) bertambah hingga mencapai 27.549.690 jiwa (2020) itu artinya ada sekitar 2.763.820 jiwa angka kemiskinan pendatang baru. Selanjutnya pada Tahun 2021 Indonesia kembali memulihkan perekonomian sehingga dapat menekan angka kemiskinan mencapai (9,71%) dari tahun sebelumnya (10,19%),² untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

² Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id> Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2016-2021 (diakses 13 Juni 2022) Pukul 10.00 WIB.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2016-2021

Bln/Thn	Jumlah Penduduk Miskin (Juta jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Desa	Kota	Desa+ Kota	Desa	Kota	Desa + Kota
Sep-16	17,27	10,48	27,76	13,96	7,73	10,70
Sep-17	16,31	10,27	26,58	13,47	7,2	10,12
Sep-18	15,54	10,13	25,67	13,10	6,89	9,66
Sep-19	14,92	9,85	24,78	12,60	6,56	9,22
Sep-20	15,51	12,03	27,54	13,20	7,88	10,19
Sep-21	14,64	11,86	26,50	12,53	7,60	9,71

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Berbagai program sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemberdayaan UMKM, Program Dana Bantuan Sosial (BANSOS) dan lain-lain. Namun, upaya tersebut belum efektif untuk menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah sehingga diperlukan instrumen alternatif lain yang bertujuan agar dapat menjadi solusi terhadap permasalahan kemiskinan dan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak, sedekah (ZIS).³

³Irfan Syaiki Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", *Jurnal Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol II, h.1.

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah SWT.⁴ Membayar zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang tergolong mampu. Perintah zakat memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal merupakan bentuk ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah SWT, sedangkan horizontal merupakan bentuk kesadaran sosial terhadap sesama umat muslim. Zakat merupakan ibadah sosial yang mampu memberi manfaat secara materi kepada sesama manusia yang tergolong penerima zakat, dalam kedudukannya perintah zakat dipandang ibadah yang sangat penting seperti halnya perintah melaksanakan shalat, dimana perintah zakat dalam Al-Quran sering bersamaan dengan perintah shalat, hal ini menandakan betapa pentingnya membayar zakat bagi umat muslim. Selanjutnya, tujuan zakat sendiri bukan hanya sekedar untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, melainkan ada tujuan zakat yang lebih penting dan permanen yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.⁵ Sehingga dengan adanya kewajiban dalam membayar zakat tentu ini sebagai solusi agar uang yang beredar di masyarakat

⁴ Didiek Ahmad Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rezeki Putra, 2013), h. 37.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

dapat berputar sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan atau penimbunan sejumlah uang di sebagian pihak.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 mencatat ada sekitar 87,2% penduduk muslim di Indonesia dari jumlah penduduk 270,2 juta jiwa. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar jika instrumen zakat dapat dijalankan dengan maksimal. Berikut tabel potensi zakat dan pengumpulan zakat 2015-2019.

Tabel 1.2 Potensi Zakat Nasional Tahun 2015-2019

Rincian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Potensi Zakat	Triliun Rupiah	286,0	217,0	233,8	232,0	233,8
Pengumpulan Zakat	Triliun Rupiah	3,65	5,01	6,22	8,11	10,22
a. Zakat Maal Perseorangan	Miliar Rupiah	1.983,4	2.843,7	2.785,2	3.302,2	3.951,1
b. Zakat Maal Badan	Miliar Rupiah	157,8	620,5	307,0	492,4	306,7
c. Zakat Fitrah	Miliar Rupiah	168,1	274,0	1.101,9	1.112,6	1.406,1
Pertumbuhan Pengumpulan Zakat	Persen (%)	10,6	37,5	24,1	30,4	26,0

Sumber: Diolah dari Statistik Zakat Nasional, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terdapat potensi zakat yang sangat besar namun optimalisasi pengumpulan dana zakat yang masih rendah.

Tahun 2015 potensi yang harus terkumpul 286,0 triliun namun BAZNAS hanya mampu mengumpulkan sekitar 3,65. Pada tahun berikutnya 2016 pengumpulan dana zakat mengalami kenaikan dengan mampu mengumpulkan dana zakat 5,01 triliun sehingga dalam hal ini BAZNAS mengalami pertumbuhan pengumpulan zakat 37,5%. Pengumpulan dana zakat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 secara perlahan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 BAZNAS mampu mengumpulkan dana zakat hingga mencapai 10,22 triliun rupiah. Selanjutnya apabila melihat persentase pertumbuhan pengumpulan dana zakat dapat dilihat pertumbuhannya hanya mencapai 24,0% untuk 2017, ini menandakan masih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 2016 yang mencapai 37,4%. Berikutnya pada tahun 2018 persentase pertumbuhan dana zakat mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu 30,4%, namun pada tahun berikutnya yaitu 2019 persentase pertumbuhan BAZNAS kembali turun hanya mencapai 26,0%. Keadaan tersebut menandakan ketidakkonsistenan BAZNAS dalam pengumpulan atau penghimpunan dana zakat. Berdasarkan data tabel 1.2 yang disajikan di atas dapat dilihat potensi zakat yang sangat besar namun ironinya tidak seimbang dengan pengumpulan yang masih rendah. Hal ini menunjukkan optimalisasi pengumpulan dana zakat

yang masih relatif rendah. Namun, walaupun belum dapat mencapai realisasi optimal tetapi instrumen zakat dalam pengentasan kemiskinan merupakan langkah kongkrit yang langsung terasa oleh *mustahik*. Besarnya potensi zakat di Indonesia harus diikuti oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) yang optimal dan efisien dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat oleh karena itu dibutuhkan lembaga pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional.⁶ Untuk terciptanya pengelolaan zakat yang lebih optimal pemerintah mengatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar lebih terintegrasi dan profesional.

Pengelolaan dana zakat dalam pelaksanaannya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan, perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk mengetahui sejauh mana OPZ mampu mengelola dana zakat dengan baik, dimulai dari penghimpunan sampai penyaluran, maka dibutuhkan alat ukur atau indikator yang sesuai, salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja OPZ adalah efisiensi.

⁶Baridi, dkk. *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Center For Entrepreneurship Development, 2005), h. 69.

Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.⁷ Berdasarkan pendekatan disiplin ilmu ekonomi, efisiensi digunakan untuk merujuk sebuah konsep dalam mengukur sumber daya agar mendapatkan hasil yang optimal dan dapat dijadikan alat ukur untuk membandingkan kinerja satu dengan yang lainnya. Efisiensi merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja perusahaan atau lembaga yang memiliki laporan keuangan dalam hal ini BAZNAS, yang berpedoman kepada PSAK 109 tentang akuntansi zakat.⁸ Penerapan PSAK 109 merupakan menjadi bukti komitmen pengelola dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.⁹ Dengan demikian, maka BAZNAS harus memenuhi tata kelola yang baik dalam hal ini adalah indikator efisiensi.

Berdasarkan dari uraian di atas penulis bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pusat. Penelitian ini

⁷ Deprtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 352.

⁸ Annisa Rahmayanti, "Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus: PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI)," Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 5.

⁹ Megawati, dkk. "Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Shadakah pada BAZ Kota Pekanbaru", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17 No 1 (Januari-Juni 2014), h. 41.

mengukur tingkat efisiensi pada BAZNAS merupakan hal yang menarik mengingat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar namun optimalisasi pengumpulan dan zakat yang masih tergolong rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat mengetahui sejauh mana efisiensi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengalokasikan sumber input untuk menghasilkan beberapa output dengan judul penelitian *“Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengelolaan Dana Zakat : Pendekatan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2011-2020”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, selanjutnya penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif pada lima tahun terakhir, meskipun mengalami penurunan namun masih belum stabil karena pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik sehingga hal ini menunjukkan perlu adanya instrumen alternatif guna menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim dengan potensi zakat yang sangat besar namun ironinya pengumpulan dana zakat yang masih kurang optimal dibandingkan dengan potensi zakat yang ada.
3. Perlunya indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai OPZ, dalam hal ini BAZNAS.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terukur, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar tidak mengarah kepada pembahasan lain, dalam penelitian ini penulis terfokus kepada :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada lembaga amil zakat dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) khusus untuk BAZNAS Pusat.
2. Penelitian ini dilakukan dari periode 2011 sampai dengan periode 2020 dengan alasan dan pertimbangan periode tersebut masih relevan untuk diteliti.
3. Penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan menggunakan variabel input (total aset, belanja pegawai, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas)

variabel output (jumlah penerimaan dan zakat dan jumlah penyaluran dana zakat).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan produksi periode 2011-2020?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab inefisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2011-2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dipaparkan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS dengan menggunakan metode DEA periode 2011-2020.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab inefisiensi BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat periode 2011-2020.

F. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sumbangan ilmu pengetahuan serta menambah khazanah ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya terkait dengan pengelolaan dana zakat.

2. Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga yang berkaitan dengan penelitian tersebut dalam hal ini adalah BAZNAS dalam melakukan kebijakan pengelolaan dana zakat serta penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi oleh praktisi zakat sejauh mana tingkat efisiensi kinerja BAZNAS serta faktor penyebab inefisiensi sebagai evaluasi untuk pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat.

b. Bagi penulis

Bagi penulis sendiri, dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu dapat mengetahui dan menambah

wawasan serta pengetahuan dalam praktiknya pengelolaan dana zakat.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada pembaca terhadap dana zakat yang terkumpul di BAZNAS serta penyalurannya. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi pihak yang terlibat di dalamnya sehingga khazanah keilmuan semakin luas dan mendalam.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya sebagai informasi kinerja OPZ dalam hal ini adalah BAZNAS pusat dalam mengelola dana zakat. Selain bermanfaat bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para *muzaki* agar dapat mengetahui jumlah zakat yang terhimpun dan tersalurkan sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah semangat dalam membayar zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran alur penulisan tulisan ilmiah dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan pada penelitian ini memaparkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis

Pada kajian teoritis ini akan memaparkan konsep efisiensi yaitu pengertian efisiensi, prinsip-prinsip efisiensi, efisiensi dalam perspektif Islam, serta pengukuran efisiensi. Selain itu juga di bab II akan memaparkan konsep zakat baik itu pengertian zakat, landasan tentang zakat, fungsi dan tujuan zakat, serta macam-macam zakat.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada metode penelitian ini akan menguraikan rincian yang terdiri dari jenis metode penelitian yang digunakan, gambaran umum

lokasi dan waktu penelitian, penjelasan judul penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian akan menguraikan hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan yang analisis dan terpadu.

Bab V Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yaitu jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang telah dijawab pada pembahasan di bab IV. Sedangkan saran merupakan masukan yang dapat disampaikan kepada pihak lain.